



RILIS
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024–2025
KE PROVINSI JAWA BARAT
21-25 DESEMBER 2024

Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21-25 Desember 2024. Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ini dipimpin oleh Ibu Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, diikuti oleh beberapa Anggota Komisi III DPR RI dari berbagai Fraksi. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat ini, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI diterima oleh Irjen. Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M selaku Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H. ., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Brigjen. Pol. M. Arief Ramdhani, S.I.K., selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H. , selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, H. Husban, S.H., M.H. , selaku Ketua Pengadilan TUN Bandung dan Kolonel Kum. Dahlan Suherlan, S.H., M.H., sebagai Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dalam kesempatan itu, Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Jawa Barat memberikan paparan mengenai pertanyaan yang telah disampaikan oleh Komisi III DPR RI terkait fungsi anggaran dan pengawasan.

Para Ketua/Kepala Empat Peradilan serta Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kepala BNNP dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyampaikan realisasi anggaran tahun 2024 serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Masing-masing memberikan penjelasan mengenai rencana strategis dan program yang akan menjadi prioritas pada tahun 2025, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sumber daya manusia.

Komisi III DPR RI memperhatikan fungsi pengawasan terkait perkara-perkara yang menonjol di empat lingkungan peradilan, data mengenai eksekusi putusan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan. Diskusi juga mencakup evaluasi kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus narkoba dan tindak pidana korupsi.

Kapolda Jabar, Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional dalam upaya menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Kerjasama ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dan mempercepat proses peradilan.

Beberapa langkah yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menonjol termasuk peningkatan kapasitas penyidik, percepatan proses peradilan, dan peningkatan pengawasan terhadap proses hukum yang berjalan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menekankan pentingnya tindakan preventif dalam menangani kasus-kasus narkoba dan tindak pidana korupsi.

Pertemuan ini memberikan wawasan yang penting mengenai kinerja lembaga penegak hukum di Provinsi Jawa Barat. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat proses peradilan, dan mengatasi kendala anggaran. Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mendukung terciptanya supremasi hukum di Indonesia.

Bandung, 23 Desember 2024

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Barat